



DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN

# LKIP 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BEKASI



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang diimpikan kepada kami, sehingga dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi telah menyelesaikan kerjanya pada Tahun 2023. Selanjutnya capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan laporan ini, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami, untuk itu kami mohon saran perbaikan atas kekurangan tersebut, agar menjadi motivasi bagi penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menggambarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama sebagai bahan penyusunan LKIP Kota Bekasi Tahun 2023 dan Penjanjian Kinerja Kota Bekasi Tahun 2023 yang akan disampaikan Wali Kota kepada Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB.

Bekasi, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

**Herbert S.W. Panjaitan, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19741017 199603 1 002



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2018 – 2023. Laporan ini berisi perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disajikan Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola perencanaan kinerja mulai Rencana Strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mempunyai 4 (empat) sasaran strategis serta 8 (delapan) program. Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2023 mencapai tingkat persentase (94,14%), Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat pada tahun 2023 mencapai tingkat persentase (101,92%), Meningkatnya Produksi hasil Pertanian sebesar (111,76%), serta Meningkatnya Produksi hasil perikanan dan Peternakan sebesar (106,72%). Sementara itu, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan persentase capaian kinerja baik yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar (103,6%). Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dapat dinyatakan berhasil.

Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, maka dilaksanakan evaluasi terhadap program-program dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komprehensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun yang akan datang.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	7
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....	7
1.5 Sistematika Penyajian .....	10
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	12
2.1 Rencana Strategis .....	12
2.2 Perjanjian Kinerja 2023 .....	15
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	22
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	25
3.3 Realisasi Anggaran .....	63
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	69
4.1 Kesimpulan.....	69

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2023

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendidikan Pegawai DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023.....	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran DKPPP Kota Bekasi.....	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DKPPP Kota Bekasi.....	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023.....	17
Tabel 2.4	Alokasi Kegiatan Per Triwulan Tahun 2023.....	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023.....	23
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja utama nilai LHE AKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2023.....	26
Tabel 3.3	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2023.....	26
Tabel 3.4	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Target Akhir Renstra 2018- 2023.....	27
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai (LHE) AKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 dengan tahun 2022..	28
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pencapaian Skor PPH tahun 2023.....	29
Tabel 3.7	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pencapaian Skor PPH .....	31
Tabel 3.8	Data Stabilitas Haarga Pangan Beras Kota Bekasi Tahun 2023.....	31
Tabel 3.9	Skor PPH Konsumsi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2023.....	33
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2023.....	33
Tabel 3.11	Persentase Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Pengujian PSAT dan Olahan Tahun 2023.....	34
Tabel 3.12	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pencapaian Skor PPH Target Akhir Renstra 2018-2023.....	35
Tabel 3.13	Alokasi dan Realisasi Anggaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH).....	36
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023 Dengan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tahun 2023.....	39
Tabel 3.16	Indikator Capaian Program Pendukung IKU Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian.....	39
Tabel 3.17	Data Produksi Komoditas Pertanian Kota Bekasi Tahun 2022-2023.	40
Tabel 3.18	Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2023.....	41
Tabel 3.19	Jumlah Produksi Olahan Hasil Pertanian Tahun 2023.....	42
Tabel 3.20	Perbandingan Akumulasi Realisasi IKU Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Target Akhir Renstra 2018-2023.....	43
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....	45
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan 2023.....	46
Tabel 3.23	Indikator Capaian Program Pendukung IKU Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.....	47
Tabel 3.24	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Kota Bekasi Tahun 2023..	48
Tabel 3.25	Unit Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Bersertifikat Teknis di Kota Bekasi Tahun 2023.....	49
Tabel 3.26	Produksi Ikan Hias di Kota Bekasi Tahun 2023.....	51
Tabel 3.27	Produksi Ikan Konsumsi di Kota Bekasi Tahun 2023.....	52
Tabel 3.28	Produksi Unit Pengolahan Ikan Kota Bekasi Tahun 2023.....	52

Tabel 3.29 Perbandingan Akumulasi Realisasi IKU Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Dan Peternakan dengan Target Akhir Renstra 2018-2023.....	53
Tabel 3.30 Alokasi dan Realisasi Serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.....	54
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dengan 2022.....	56
Tabel 3.32 Realisasi Belanja Langsung DKPPP Tahun 2023.....	57
Tabel 3.33 Realisasi Anggaran BLPU DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023.....	6
------------	--	---

# PENDAHULUAN

## I

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Rencana Strategis (Renstra) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan pengambilan keputusan mengenai rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berpijak dari dasar ketentuan diatas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang bersifat strategis disusun menurut fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang telah diatur Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pangandan pertanian dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Dalam hal ini tugas pokok tersebut diterjemahkan sebagai urusan Pemerintahan Kota Bekasi dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagaimana urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan asas otonomi daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang panduan penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 5 ayat (2) Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 dinyatakan *“bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja”*.

Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4736);
- c) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  - e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - g) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 203/M.PAN/7/2003, tanggal 24 Juli 2003 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - h) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
  - i) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
  - j) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi.

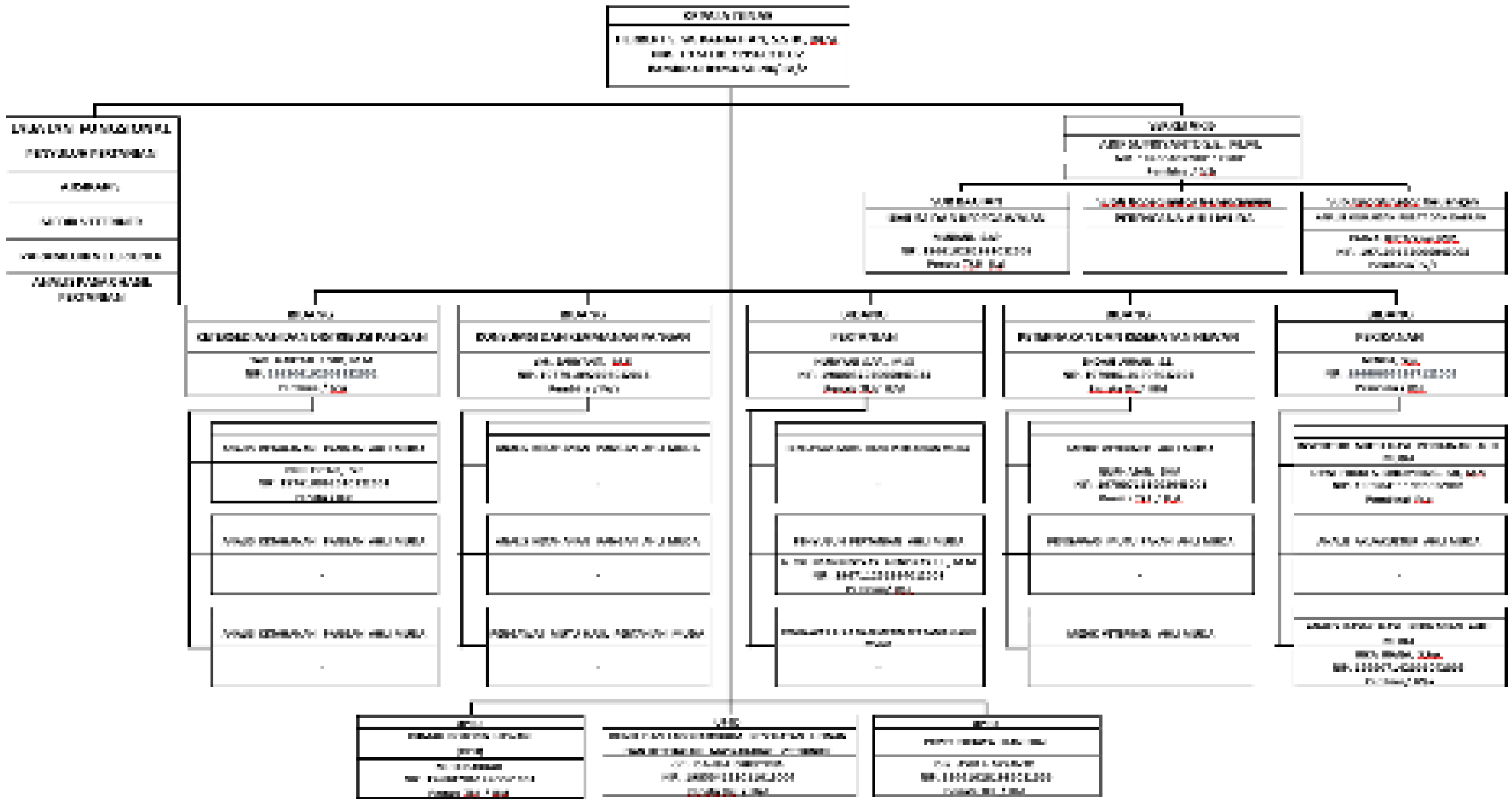
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan.

Adapun unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi terdiri dari :

- A. Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan untuk mencapai visi dan misi Dinas;
- B. Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik;

- C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta data dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- D. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi konsumsi pangan, panganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- E. Bidang Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan serta hortikultura untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- F. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- G. Bidang Perikanan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Budidaya perikanan, Pemasaran olahan hasil perikanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**



### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

### 1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun 2023 terdiri dari:

#### I. Belanja Langsung Urusan

##### 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan :

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

##### 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 1 kegiatan :

- a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. **Program Pengawasan Keamanan Pangan** terdiri dari 1 kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** terdiri dari 1 kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.
5. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
6. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** terdiri dari 4 kegiatan :
  - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer.
7. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** terdiri dari 3 kegiatan :
  - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## **II. Belanja Langsung Penunjang Urusan**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri dari 6 kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- d. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**Layanan-layanan yang dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi antara lain :**

1. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan;
2. Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
3. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
4. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara;
5. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak;
6. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
7. Rekomendasi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
9. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/ Produk Hewan;
10. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH);
11. Pemotongan Hewan Sapi di RPH (Rumah Potong Hewan);
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
13. Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Kios Pembudidayaan Ikan Hias.

### **1.5 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- a. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Analis Perencanaan Ahli Muda;
  3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
  1. Analis Ketahanan Ahli Muda.
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
  1. Analis Ketahanan Ahli Muda;
  2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda.
- d. Kepala Bidang Pertanian, membawahkan:
  1. Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
  2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda;
  3. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda.
- e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
  1. Medik Veteriner Ahli Muda.

- f. Kepala Bidang Perikanan, membawahkan:
1. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda;
  2. Analis Aquakultur Ahli Muda;
  3. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda.
- g. UPT Dinas :
1. UPTD Pembudidaya ikan Hias;
  2. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
  3. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu Kesekretariatan, lima Bidang, delapan belas Sub kordinator, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023**

SDM	Pendidikan Terakhir						
	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Pejabat struktural	0	5	6	0	1	0	0
Fungsional Umum	0	1	4	1	13	0	1
Fungsional Tertentu	0	4	10	1	0	0	0
Fungsional Penyetaraan	0	1	0	0	0	0	0
Tenaga Kontrak	0	0	16	4	10	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DKPPP*

### 1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

**B. Akuntabilitas Anggaran**

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## PERENCANAAN KINERJA

## II

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) Program dan 18 (delapan belas) indikator kinerja/program. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2023, dengan target satuan berupa % (persen), unit, ton, dan kasus sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2018 - 2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

**a. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

**Tujuan** merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Kuat;
3. Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian;
4. Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan

**b. Sasaran** merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018- 2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat;
3. Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian;
4. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan**  
**Perikanan Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke							TARGET AKHIR RENSTRA
					Kondisi Awal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70%	70%	75%	80%	81%	81,5%	82%	82%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai AKIP DKPPP	Nilai	72	73	75	79	80	82	83	83
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Kuat		Indeks Ketahanan Pangan	%	80%	81%	81%	83%	84%	84,5%	85%	85%
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	38%	38%	38%	39%	40%	41%	41,5%	41,5%
3	Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	78%	79%	79%	79,5%	80%	81%	81,6%	81,6%
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	%	38%	38%	38%	39%	40%	41%	42%	42%
4	Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan		Jumlah Total Produksi Perikanan dan Peternakan	%	98%	98%	98%	98,5%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	%	38%	38%	38%	39%	40%	41%	41,5%	41,5%

**b. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**

NO	SASARAN	INDIKATO RKINERJA SASARAN	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai AKIP DKPPP	Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	$\frac{\text{Nilai Capaian AKIP}}{\text{Target}} \times 100\%$	Nilai	83
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2017 tentang IKU Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	Koefisien harga pada hari normal dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN)	%	41,5%
3	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2017 tentang IKU Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian selama 1 tahun	%	42%
4	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2017 tentang IKU Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	Jumlah Pemeriksaan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis selama 1 tahun	%	41,5%

## 2.1 PERJANJIAN KINERJA 2023

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

**Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP**, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

**Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat.** Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

**Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian.** Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian.

**Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan.** Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai AKIP DKPPP	Nilai	83	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	83
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	41,5%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	41,5%
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	%	42%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	42%
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	%	41,5%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	41,5%

Tabel 2.4

## Alokasi Kegiatan Per Triwulan Tahun 2023

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	TRIWULAN				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16,644,045,280</b>	<b>2,961,015,412</b>	<b>5,462,350,143</b>	<b>3,780,353,629</b>	<b>4,440,326,096</b>	
-	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3,000,000</b>	-	<b>3,000,000</b>	-	-	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000		3,000,000			
-	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13,640,204,000</b>	<b>2,406,243,409</b>	<b>4,449,736,273</b>	<b>3,062,989,259</b>	<b>3,721,235,059</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,637,204,000	2,406,243,409	4,448,236,273	3,062,989,259	3,719,735,059	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000		1,500,000		1,500,000	
-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
-	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>440,814,000</b>	<b>31,521,000</b>	<b>346,041,000</b>	<b>31,521,000</b>	<b>31,731,000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000		25,000,000			
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284,520,000		284,520,000			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,210,000	7,050,000	7,050,000	7,050,000	7,060,000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	5,150,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78,084,000	19,521,000	19,521,000	19,521,000	19,521,000	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000		5,000,000			

-	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,130,730,280</b>	<b>385,952,503</b>	<b>531,574,370</b>	<b>530,843,370</b>	<b>682,360,037</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	49,995,000	49,995,000	49,995,000	50,015,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,930,730,280	335,957,503	481,579,370	480,848,370	632,345,037	
-	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>409,297,000</b>	<b>132,298,500</b>	<b>126,998,500</b>	<b>150,000,000</b>		-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,797,000	57,798,500	41,998,500			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119,500,000	74,500,000	45,000,000			
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000		40,000,000			
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000			150,000,000		
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>159,720,000</b>	<b>12,520,000</b>	<b>147,200,000</b>		-	-
-	<b>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>159,720,000</b>	<b>12,520,000</b>	<b>147,200,000</b>		-	-
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	159,720,000	12,520,000	147,200,000			
III	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>1,373,670,000</b>	<b>122,670,000</b>	<b>385,410,000</b>	<b>865,590,000</b>		-
-	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>133,670,000</b>	<b>122,670,000</b>		<b>11,000,000</b>		-
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	133,670,000	122,670,000		11,000,000		
-	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>1,240,000,000</b>		<b>385,410,000</b>	<b>854,590,000</b>		-
2	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,240,000,000		385,410,000	854,590,000		
IV	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>379,045,000</b>	<b>366,246,000</b>	<b>8,049,000</b>	<b>4,750,000</b>		-
-	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>379,045,000</b>	<b>366,246,000</b>	<b>8,049,000</b>	<b>4,750,000</b>		-
1	Penyediaan Sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan Segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/ Kota	379,045,000	366,246,000	8,049,000	4,750,000		

<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>540,177,000</b>	<b>60,111,000</b>	<b>480,066,000</b>	-	-	
-	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>540,177,000</b>	<b>60,111,000</b>	<b>480,066,000</b>	-	-	
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil	246,871,000		246,871,000			
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	293,306,000	60,111,000	233,195,000			
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>278,149,000</b>	-	<b>34,420,000</b>	<b>243,729,000</b>	-	
-	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>34,420,000</b>	-	<b>34,420,000</b>	-	-	
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala mikro dan Kecil	34,420,000		34,420,000			
-	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baju Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>243,729,000</b>	-	-	<b>243,729,000</b>	-	
1	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243,729,000			243,729,000		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>438,369,600</b>	<b>24,975,000</b>	<b>382,894,600</b>	<b>17,000,000</b>	<b>13,500,000</b>	
-	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>95,819,100</b>	-	<b>95,819,100</b>	-	-	
1	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	95,819,100		95,819,100			
-	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>95,780,500</b>	-	<b>95,780,500</b>	-	-	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman	95,780,500		95,780,500			
-	<b>Peningkatan Mutu dan Peedaran Benih/Bibit Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>147,320,000</b>	<b>17,600,000</b>	<b>102,720,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,500,000</b>	
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	147,320,000	17,600,000	102,720,000	13,500,000	13,500,000	
-	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	<b>99,450,000</b>	<b>7,375,000</b>	<b>88,575,000</b>	<b>3,500,000</b>	-	
1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						

		99,450,000	7,375,000	88,575,000	3,500,000		
<b>VI II</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>378,539,500</b>	<b>57,370,000</b>	<b>145,275,000</b>	<b>144,094,500</b>	<b>31,800,000</b>	
-	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>245,446,500</b>	<b>40,670,000</b>	<b>102,750,000</b>	<b>83,726,500</b>	<b>18,300,000</b>	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	245,446,500	40,670,000	102,750,000	83,726,500	18,300,000	
-	<b>Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>133,093,000</b>	<b>16,700,000</b>	<b>42,525,000</b>	<b>60,368,000</b>	<b>13,500,000</b>	
1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	133,093,000	16,700,000	42,525,000	60,368,000	13,500,000	

**AKUNTABILITAS KINERJA****III**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DKPPP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja sasaran strategis DKPPP Kota Bekasi dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* realisasi kinerja aktual tahun 2023 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja *outcome*. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu indikator

yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai DKPPP Kota Bekasi selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja DKPPP Kota Bekasi tahun 2023, serta 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. **Semua indikator kinerja tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.**

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

**TABEL 3.1**

**CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	83	78,14	94,14%
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	41,5%	42,3%	101,92%
3.	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	%	42%	46,94%	111,76%
4.	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	%	41,5%	44,29%	106,72%

*Sumber data : Renstra DKPPP 2018-2023 dan Laporan Tahunan DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023, diolah*

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP, diukur melalui indikator yaitu Nilai (LHE) AKIP DKPPP dengan capaian kinerja 94,14%, maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP pada indikator belum mencapai target namun dengan nilai interpretasi sangat baik (Nilai BB)

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat telah menetapkan indikator yaitu Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan capaian kinerja 104,3%, dapat diinterpretasikan sasaran DKPPP Kota Bekasi pada indikator ini tercapai.

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian telah menetapkan indikator yaitu Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dengan capaian kinerja 111,76%, dapat diinterpretasikan sasaran DKPPP Kota Bekasi pada indikator ini juga tercapai.

Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan telah menetapkan indikator yaitu Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan dengan capaian kinerja 106,72%, dapat diinterpretasikan sasaran DKPPP Kota Bekasi pada indikator ini juga tercapai.

Dengan melihat 4 (empat) indikator untuk mengukur 4 (empat) sasaran strategis dimana keempat indikator di atas masih ada yang belum tercapai sehingga capaian indikator kinerja tersebut mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan DKPPP Kota Bekasi dalam Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP yang mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar nilai 78,14 dari target nilai yang telah ditetapkan sebesar 83 dengan capaian kinerja 94,14%, indikator tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Kuat yang mencapai target yaitu sebesar 42,3% dari target yang telah ditetapkan sebesar 41,5% dengan capaian kinerja

101,92%, indikator tujuan Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian yaitu dengan realisasi sebesar 46,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar 42% dengan capaian kinerja 111,76%, serta indikator tujuan Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan yaitu dengan realisasi sebesar 44,29% dari target yang telah ditetapkan sebesar 41,5% dengan capaian kinerja 106,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator sasaran DKPPP Kota Bekasi sudah sepenuhnya mendukung tujuan DKPPP Kota Bekasi dan capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP**

**Indikator Kinerja : Nilai (LHE) AKIP DKPPP**

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Nilai (LHE) AKIP DKPPP maka DKPPP Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP DKPPP yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan. Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DKPPP dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI**  
**(LHE) AKIP DKPPP TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2023			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN2023
1	2	3	6	7	8
1	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	83	78,14	94,14%

*Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah*

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2023 sebesar 83, sementara realisasi mencapai 78,14 maka capaian kinerja tahun 2023 atas Nilai (LHE) AKIP DKPPP sebesar 94,14%, maka capaian Nilai (LHE) AKIP DKPPP pada tahun 2023 belum mencapai target. Dengan demikian pada tahun 2023 komponen dan sub komponen pada point penilaian LHE untuk DKPPP Kota Bekasi telah mendapatkan nilai AKIP “BB” dengan interprestasi Sangat Baik.

Adapun rekapitulasi perolehan Nilai AKIP DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 3.3**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KOTA BEKASI DKPPP KOTA BEKASITAHUN 2023**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	Y/T	NILAI
1	2	3	4	5
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,68	22,68
B	PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,94	22,94
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,34	11,34
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	21,18	21,18
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>78,14%</b>	<b>78,14</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>	

*Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023*

*Diolah*

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukkan bahwa secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DKPPP pada tahun 2023 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan memperoleh nilai 78,14% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja dengan predikat nilai “**BB**” (**Sangat Baik**). Hasil evaluasi Tahun Anggaran 2023 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 4 (empat) komponen Manajemen Kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMATARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	NILAI (LHE) AKIP	
		2023	2023 (Akhir Renstra 2018-2023)
Target	Nilai	83	83
Realisasi	Nilai	78,14	78,14

*Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Data LHE Inspektorat terhadap DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023*

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Nilai (LHE) AKIPDKPPP pada tahun 2023 sebesar 78,14 dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2023 sebesar 83, maka DKPPP Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari DKPPP Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai (LHE) AKIP DKPPP.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga DKPPP Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi turut melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan *crosscutting* kinerja antara DKPPP dengan perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola hubungan kerja antar

- instansi perangkat daerah;
- b. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki *cascade* kinerja mulai organisasi hingga individu;
  - c. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
  - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien.

**Tabel 3.5**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA NILAI (LHE) AKIP DKPPP**  
**TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	74,68	78,14

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 sebesar 74,68 (BB) dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 83 (A), maka Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi harus dapat meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				(Rp)	%		
1.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.093.150.302</b>	13.826.992.264	80,89 %	<b>100%</b>	19,11%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.961.100	98,70 %		1,3%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.637.204.000	10.598.094.941	77,71 %		22,29%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.952.000	98,40 %		1,6%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	18.623.000	93,12 %		6,88
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.103.000	96,41 %		3,59
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.020.000	236.296.500	89,50 %		10,5
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.210.000	27.543.330	97,64 %		2,36
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.732.000	98,66 %		1,34
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.084.000	77.919.875	99,79 %		0,21%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.950.000	99,00 %		1%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	81.784.074	40,89 %		59,11%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.163.232.302	2.112.092.844	97,64 %		2,36%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.300.000	235.086.000	95,45 %		4,55%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.100.000	195.331.600	92,97 %		7,03%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	39.920.000	99,80%		0,2%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.602.000	99,73 %		0,27%

Sumber: <https://simplbang.bekasikota.go.id/>, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian indikator Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP”, di mana pagu anggaran sebesar Rp17.093.150.302,- dengan realisasi sebesar Rp13.826.992.264,-. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 80,89% yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 78,14 (BB) dari target sebesar 83 (A), maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan belum efisien. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja;
2. Meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
3. Mengajukan usulan penambahan anggaran kegiatan dari tahun sebelumnya untuk menunjang program dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat**  
**Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola**  
**Pola Pangan Harapan (PPH)**

Indikator kinerja pada persentase peningkatan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan ukuran keberhasilan atas penanganan stabilitas harga pangan, penanganan kerawanan pangan, peningkatan panganeekaragaman serta pengawasan keamanan pangan yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.6**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PERSENTASE PENINGKATAN PENCAPAIAN SKOR POLA**  
**PANGAN HARAPAN (PPH) TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	41,5%	42,3% (Rp2.140.285.000)	101,92%

*Sumber data: Renstra 2018-2023 Dinas DKPPP Kota Bekasi, Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan & Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.*

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 sebesar 41,5%, sementara realisasi mencapai 42,3%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 101,92%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2023 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang mencapai target yang sudah ditentukan. untuk mengetahui persentase peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dengan menjumlahkan realisasi pada indikator

program stabilitas harga pangan, indikator program skor pola pangan harapan, indikator program persentase penanganan kerawanan pangan serta indikator program persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Dengan formulasi Realisasi indikator program / target x Target persentase peningkatan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

$$5.71\%+91,8\%+86.80\%+88,73\% = 273,04$$

$$5\%+88\%+86,80\%+88\% = 267,8$$

$$273,04 / 267,8 \times 41,5\% = 42,3\%$$

Keberhasilan tercapainya target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tepat waktu dan tepat sasaran karena didukung data dan informasi yang valid penerima bantuan cadangan pangan (data FSVA dan Dinsos)
2. Melaksanakan perhitungan kestabilan harga pangan pokok beras;
3. Kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga merupakan hal pokok dalam kelangsungan hidup, untuk itu selain ketersediaannya juga perlu diperhatikan pola konsumsi rumah tangga atau keseimbangan kontribusi diantara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi standar gizi yang dianjurkan;
4. Pola konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh pola makan sebagian besar penduduk, ketersediaan bahan pangan dan tingkat pendapatan;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, pengawasan PSAT dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangandengan sasaran untuk meningkatkan ketahanan pangan yang kuat;
6. Melakukan pengawasan dengan pengambilan sampel pangan melalui pengujian 20 pasar tradisional dan pasar modern se Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada DKPPP Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Peningkatan pencapaian SKOR PPH**

NO	INDIKATORPROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN2023 (%)
1	Stabilitas Harga Pangan	%	<5	5.71	87.75%
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88	91,8	104,31%
3	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	86.80	86.80	100%
4	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	88	88,73	100,8%

*Sumber data : Evaluasi Internal DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023, diolah.*

### 1. Indikator Program Stabilitas harga Pangan

**Tabel 3.8**  
**Data Stabilisasi Harga Pangan Beras di Kota Bekasi Tahun 2023**

No.	Bulan	Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4	Rata-rata Harga
1	Januari	Rp 12,000.00	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00	Rp 11,250.00
2	Februari	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00
3	Maret	Rp 11,000.00	Rp 11,000.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,750.00
4	April	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00
5	Mei	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00
6	Juni	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00
7	Juli	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00
8	Agustus	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,500.00	Rp 10,700.00	Rp 10,550.00
9	September	Rp 11,000.00	Rp 13,000.00	Rp 13,000.00	Rp 12,500.00	Rp 12,375.00
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Rata-rata</b>						<b>10881</b>
<b>STDEV</b>						<b>621.46</b>
<b>CV</b>						<b>5.71%</b>

*Sumber : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, diolah*

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat kestabilan harga pangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara jumlah rata rata harga pangan stabil. Sehingga sasaran strategis stabilitas harga pangan dapat dikatakan tercapai. Pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah. Kenaikan dan gejolak yang terjadi pada komoditas pangan terutama beras akan menurunkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat yang berpenghasilan rendah dan

juga memicu kenaikan laju inflasi. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat, gejolak harga yang terjadi akan berdampak kepada masyarakat selaku konsumen dan juga petani selaku produsen komoditas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga pasar.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Stabilitas Harga Pangan ini yaitu :

- a) Selama Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan melakukan Operasi pasar yang merupakan upaya jangka pendek untuk menekan harga pangan;
- b) Selama tahun 2023 Membentuk dan bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI) untuk memotong mata rantai pasok yang selama ini menyebabkan harga pangan tinggi.
- c) Selama tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan pertanian dan Perikanan Memetakan jalur distribusi bahan pokok untuk menjaga kelancaran distribusi dan mengidentifikasi masalah apabila terjadi gejolak harga.

Melaksanakan koordinasi daerah dan penetrasi pasar menjelang puasa dan lebaran dan hari besar keagamaan lainnya dalam rangka menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

## **2. Skor Pola Pangan harapan (PPH)**

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan gambaran kondisi konsumsi pangan penduduk secara kualitas yang juga menunjukkan keberagaman konsumsi pangan. Hasil Justifikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Tahun 2023 menggunakan data susenas tahun 2023 dengan perhitungan memakai perhitungan  $AKE = 2100$  kkal/kapita/hari dan  $AKP = 57$  Gram/kapita/hari ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.9  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita/Hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	292,5	1.120	54,5	53,3	0,5	27,3	26,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	40,0	41	2,0	1,9	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	156,0	335	16,3	15,9	2,0	32,6	31,9	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	29,2	263	12,8	12,5	0,5	6,4	6,3	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,3	7	0,4	0,3	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacangkacangan	32,4	77	3,7	3,7	2,0	7,5	7,3	10,0	7,3
7	Gula	12,1	47	2,3	2,2	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
8	Sayur dan Buah	240,8	119	5,8	5,7	5,0	28,9	28,3	30,0	28,3
9	Lain-lain	86,4	47	2,3	2,3	-	-	-	-	-
	Total		2.055	100,0	97,9	-	104,9	102,7	100,0	91,8

Sumber : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Dengan melihat capaian indikator program Skor Pola Pangan harapan (PPH) yang tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

### 3. Persentase Penanganan Kerawanan Pangan

Tabel 3.10  
Analisis Pencapaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	persen	86.80	86.80	100%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 86.80 Persen, sementara realisasi hanya mencapai 86.80 persen, maka capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Penanganan Kerawanan Pangan di Kota Bekasi sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2023 sudah mencapai target. Dimana formulasi pengukuran persentase penanganan kerawanan pangan yaitu (Jumlah Kelurahan yang dibantu / Jumlah Kelurahan Kota Bekasi x 100%).

56 Kelurahan / 56 Kelurahan = 100% (seratus persen)



Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 88% dan realisasi 88,73% Persen. Untuk menghitung realisasi ini dengan formula : **Jumlah sampel yang memenuhi syarat / jumlah total sampel x 100%** (jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 307 dan jumlah total sampel sebanyak 346) jadi :  $307/346 \times 100\% = 88,73$ , maka capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Bekasi sebesar 88,73%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2023 sudah mencapai target.

Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**

Perbandingan akumulasi realisasi indikator kinerja utama  
Persentase Peningkatan Pencapaian Skor PPH Target akhir RENSTRA 2018-2023

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PERSENTASE PENINGKATAN PENCAPAIAN SKOR PP	
		2022	2023
Target	%	41	41,5
Realisasi	%	41	42,3

Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Laporan Tahunan DKPPP Kota Bekasi

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 sebesar 41% dan realisasi Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 sebesar 42,3%, maka DKPPP Kota Bekasi dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja Indikator Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diantaranya :

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DKPPP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap stabilitas harga pangan di Kota Bekasi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13  
Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2022 dan tahun 2023  
Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022					ANGGARAN TAHUN 2023				
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%				Rp	%		
1	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor (Pola Pangan Harapan (PPH))	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	307.600.000	224.777.000	73,07	100	26,93	521.240.000	445.963.000	85,56	100	14,44
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		-	-	-	-	-	133.670.000	133.670.000	100	100	0	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		-	-	-	-	-	133.670.000	133.670.000	100	100	0	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		307.600.000	224.777.000	73,07	100	26,93	387.570.000	312.293.000	80,58	100	19,42	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		307.600.000	224.777.000	73,07	100	26,93	387.570.000	312.293.000	80,58	100	19,42	
Program Penanganan Kerawanan Pangan		1.400.000.000	1.125.839.600	80,42	100	19,58	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	100	15,1	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.400.000.000	1.125.839.600	80,42	100	19,58	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	100	15,1	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000.000	1.125.839.600	80,42	100	19,58	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	100	15,1
	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>207.934.998</b>	<b>83,17</b>	100	16,83	379.045.000	349.972.000	92,33	100	7,67
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000</b>	<b>207.934.998</b>	<b>83,17</b>	100	16,83	<b>379.045.000</b>	<b>349.972.000</b>	92,33	100	7,67
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	207.934.998	83,17	100	16,83	379.045.000	349.972.000	92,33	100	7,67

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2023,diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program, 4 (empat) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dimana pagu anggaran pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp521.240.000,00 (*lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp445.963.000,00 (*empat ratus empat puluh empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang mana dari serapan anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 85,56% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan. Selanjutnya pada Program Penanganan Kerawanan Pangan dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.240.000.000,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.052.705.600,00 (*satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 84,90% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Program Pengawasan Keamanan Pangan dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp379.045.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp349.972.000,00 (*tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 92,33% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan sebesar 42,3% dari target sebesar 41,5% atau dengan capaian kinerja sebesar 101,92%, serta serapan anggaran sebesar 85,56% dan 84,90% serta 92,33%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 14,44% dan 15,1% serta 7,67%, dan terdapat sisa anggaran yang cukup besar, namun begitu capaian kinerja dapat melampaui target dan mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023 Dengan Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	41	42,3

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat kenaikan capaian kinerja dari 41% pada tahun 2022 menjadi 42,3% pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 1,3%. DKPPP Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Pencapaian Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan yang sudah diraih saat ini oleh karena itu untuk kedepan DKPPP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan secara optimal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan diversifikasi (panganekaragaman) pangan masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan, pengujian mutu dan keamanan pangan segar.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian**

**Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian**

Indikator kinerja pada persentase peningkatan Hasil Produksi Pertanian merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian peningkatan produksi komoditas pertanian yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil  
Produksi Pertanian Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	%	42%	46,94% (Rp2.572.912.447)	111,76%

*Sumber data: Renstra 2018-2023 Dinas DKPPP Kota Bekasi, Bidang Pertanian.*

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian pada tahun 2023 sebesar 42%, sementara realisasi mencapai 46,94%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian sebesar 111,76%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2023 menunjukkan realisasi sudah mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui perhitungan indikator kinerja persentase peningkatan hasil produksi pertanian adalah dengan formulasi  $\text{Produksi komoditas pertanian} + \text{Jumlah produksi peternakan} + \text{jumlah produksi olahan peternakan}$  selama 1 tahun yaitu  $30.942 \text{ ton} + 12.305,89 \text{ ton} + 3.700 \text{ ton} = 46.947,89 \text{ ton} \times 100\%$  maka realisasi persentase peningkatan hasil produksi pertanian = 46,94%

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
Indikator Capaian Program Pendukung  
Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1	Produksi Komoditas Pertanian	ton	33.515	30.942	92,32%
2	Jumlah Produksi Peternakan	ton	10.985	12.305,89	112,02%
3	Jumlah Produksi Olahan Peternakan	ton	3.777,24	3.700	97,95%

*Sumber data : Evaluasi Internal DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023, diolah.*

Dengan melihat capaian indikator program yang tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian.

## 1. Indikator Kinerja Produksi Komoditas Pertanian

Tabel 3.17  
Data Produksi Komoditas Pertanian Kota Bekasi Tahun 2022-2023

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (TON)	
		TH.2022	TH.2023
<b>1</b>	<b>TANAMAN PANGAN</b>		
	- Padi	2.840,3	3.586,6
	- Jagung	180,4	183,9
	- Kedelai	-	-
	- Ubi Kayu	259,5	189,6
	- Ubi Jalar	-	-
	- Kacang Tanah	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.280,2</b>	<b>3.960</b>
<b>2</b>	<b>SAYURAN</b>		
	- Petsai Sawi	2.251	2.234
	- Kacang Panjang	874	828
	- Bayam	5.078	5.183
	- Ketimun	-	-
	- Cabe Rawit	1.080	1.200
	- Terong	724,5	630
	- Kangkung	5.418	5.529
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.426</b>	<b>15.604</b>
<b>3</b>	<b>BUAH</b>		
	- Belimbing	76	94
	- Jeruk	3	3
	- Durian	9	8
	- Duku	10	12
	- Jambu Biji	1.055	710
	- Nangka	-	40
	- Jambu Air	-	16
	- Mangga	240	259
	- Sawo	267	365
	- Pepaya	1.795	1.530
	- Pisang	748	654
	- Rambutan	1.287	1.119
	- Sirsak	11	15
	- Sukun	13	12
	- Melinjo	-	59
	- Petai	-	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.514</b>	<b>5.514</b>
<b>4</b>	<b>BIOFARMAKA</b>		
	- Jahe	1.273	2.652
	- Laos / Lengkuas	2.318	2.662
	- Kencur	447	416
	- Kunyit	501	385
	- Lempuyang	340	221
	- Temu Ireng	-	-
	- Lidah Buaya	-	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.879</b>	<b>6.338</b>
	<b>HIDROPONIK</b>	<b>183</b>	<b>140</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29.099</b>	<b>30.942</b>

Sumber: Bidang Pertanian, diolah

Perkembangan produksi sektor pertanian di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di atas. Produksi pertanian di kota Bekasi terdiri dari kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan/biofarmaka), peternakan, dan perikanan. bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok tanaman pangan. Produksi pertanian berupa tanaman obat-obatan pada tahun 2022 sebesar 4.879 ton dan tahun 2023 naik signifikan menjadi 6.338 ton. Sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2022 produksinya 15.426 ton dan pada tahun 2023 produksi sayuran naik cukup signifikan menjadi 15.604.

Adapun faktor yang menentukan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Produksi pertanian berkurang karena lahan tidak ada tanam cukup lama karena kemarau Panjang;
2. Lahan pertanian berkurang akibat banyaknya alih fungsi lahan sehingga produksi pertanian berkurang;

## 2. Jumlah Produksi Peternakan

**Tabel 3.18**  
**Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2023**

No.	Jenis Komoditas	Produktivitas (ton)
		2023
1	Daging sapi	2.175,04
2	Daging kerbau	8,52
3	Daging domba	3.098,24
4	Daging kambing	3.352,04
5	Daging babi	3,86
6	Daging unggas	2.489,56
	<b>Jumlah</b>	<b>11.127,26</b>
7	Telur	1.105,98
	<b>Jumlah</b>	<b>1.105,98</b>
8	Susu	72,65
	<b>Jumlah</b>	<b>72,65</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>12.305,89</b>

Sumber: Data olahan bidang peternakan Kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023

Indikator kinerja Jumlah Produksi Hasil Peternakan dihitung dengan cara melaksanakan pendataan jumlah produksi peternakan yang terdiri dari produksi ternak sapi, domba/kambing, unggas dan babi di Kota Bekasi.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Peternakan ini yaitu :

- a. Selama tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah populasi ternak sapi sebesar 19,5%, kambing 30,12%, dan domba 27,84%.
- b. Sepanjang tahun 2023, melaksanakan pembinaan teknis peternakan, baik dengan cara budidaya ternak, manajemen sistem kandang, pembibitan/pengembangbiakan, penggemukan, pakan, serta pemanfaatan limbah;
- c. Meningkatkan jumlah pelaku usaha peternakan dan
- d. Menambah dan meningkatkan luas lahan Peternakan
- e. Melatih Pelaku usaha peternakan agar memiliki kemampuan teknis budidaya peternakan yang baik.

### 3. Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan

**Tabel 3.19**  
**Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan Tahun 2023**

Unit Usaha	Jumlah	Tahun 2023	
	Orang	Kg	Ton
Bakso	517	3.722.400	3.722,40
Rendang	10	19.200	19,20
Sosis	13	43.680	43,68
Jumlah		3.785.280	3.785,28

*Sumber: Data olahan bidang peternakan Kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023*

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 3.777,24 ton, sementara realisasi mencapai 3.785,28 ton, maka capaian kinerja tahun 2023 atas Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan di Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 100,21 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator Tahun 2023 sudah melebihi target.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan ini yaitu :

- a. Selama tahun 2023 terjadi peningkatan produksi olahan hasil peternakan seperti pembuatan bakso, sosis, rendang dan nugget dan olahan lainnya;

- b. Menambah jumlah pelaku usaha olahan hasil peternakan;
- c. Melatih Pelaku usaha olahan peternakan agar memiliki kemampuan teknis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;

Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.20**

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Target Akhir Renstra 2018-2023

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PERSENTASE PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	
		2022	2023
Target	%	41	42
Realisasi	%	40,5	46,94

*Sumber data : diolah Data Laporan Kinerja Tahunan DKPPP Kota Bekasi*

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 40,5% dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2023 sebesar 42%, maka DKPPP Kota Bekasi dapat terus meningkatkan capaian kerjanya. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari DKPPP Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian diantaranya :

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DKPPP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian selama tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

## Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2022 dan tahun 2023

Serta tingkat efisiensi pengguna sumber daya untuk indikator kinerja sasaran persentase peningkatan hasil produksi pertanian

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022				ANGGARAN TAHUN 2023					
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%				Rp	%		
1	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.708.685.000	2.611.994.582	96,43	100	3,57	2.572.912.447	1.008.525.500	39.2	100	60.8
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	322.100.000	299.012.613	92,83	100	7,17	1.091.319.100	174.575.000	16	100	84
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	322.100.000	299.012.613	92,83	100	7,17	961.319.000	94.575.000	9.84	100	90.16
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.930.800.000	1.873.914.714	97,05	100	2,95	1.234.823.347	744.809.500	60.32	100	39.68
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.000.000.000	978.379.750	97,84	100	2,16	827.373.500	744.809.500	90.02	100	9.98
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	930.800.000	895.534.964	96,21	100	3,79	407.449.847	0	0	100	100
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	455.785.000	439.067.255	96,33	100	3,67	-	-	-	-	-
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	455.785.000	439.067.255	96,33	100	3,67	-	-	-	-	-
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	147.320.000	57.132.000	38.78	100	61.22
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	-	-	-	-	147.320.000	57.132.000	38.78	100	61.22
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	-	-	-	99.450.000	32.009.000	32,19	100	67.81		
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	-	-	-	-	-	99.450.000	32.009.000	32.19	100	67.81		

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 4 (empat) Kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian, dimana pagu anggaran pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp2.572.912.447,00 (*dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.008.525.500,00 (*satu milyar delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang mana dari serapan anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk pelatihan hidroponik, pemanfaatan sumber day genetic hewan/tanaman, pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/tanaman skala kecil dan pemeriksaan mutu dan keamanan peredaran obat hewan. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 39.20% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian. Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian sebesar 46,94% dari target sebesar 42% atau dengan capaian kinerja sebesar 111,76%, serta serapan anggaran sebesar 39.20%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 60.8%, dan terdapat sisa anggaran yang cukup besar, namun begitu capaian kinerja belum mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun 2022.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	persen	40.5	46.94

*Sumber data : diolah Data Laporan Kinerja Tahunan DKPPP Kota Bekasi*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian terdapat peningkatan capaian kinerja dari 40.5% pada tahun 2022 menjadi 46.94% pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 6,44%.

DKPPP Kota Bekasi harus mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja persentase peningkatan hasil produksi pertanian, oleh

karena itu untuk kedepan DKPPP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pencapaian persentase peningkatan hasil produksi pertanian secara optimal.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan teknologi pertanian dalam penggunaannya;
2. Pelatihan untuk tenaga penyuluh dan petani;
3. Memaksimalkan pengawasan peredaran obat2 hewan dan pertanian;
4. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan**  
**Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan**

Indikator kinerja pada Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan produksi hasil perikanan dan peternakan.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Dan Peternakan Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	%	41,5%	44,29% (Rp1.681.865.500)	106,72%

Sumber data: Renstra 2018-2023 Dinas DKPPP Kota Bekasi, Bidang Pertanian.

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan pada tahun 2023 sebesar 41,5%, sementara realisasi mencapai 44,29%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian sebesar 106,72%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2023 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi masih belum mencapai target yang sudah ditentukan. Adapun Formulasi perhitungan persentase peningkatan hasil produksi perikanan dan peternakan adalah realisasi capaian tahun 2023/n x 41.5% =  $100\%+88,9\%+100,4\%+106,64\%+100,99\%+101,99\% = 640,42/6=106,73$   
 $= 106,73 \times 41,5\% = 44,29\%$

Adapun keberhasilan akan target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Melaksanakan pembinaan higiene sanitasi dan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat pada unit usaha pangan dan non pangan asal hewan;
2. Melaksanakan pengawasan, pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan pada unit usaha produsen, retail pangan asal hewan baik retail modern maupun pasar tradisional;
3. Bertambahnya Pembudidaya baru di bidang ikan konsumsi, Adanya bantuan calon indukan dari Balai Besar Budidaya Ikan Air Tawar;
4. Adanya Penambahan kelompok Baru Pembudidaya ikan hias, Pengiriman ikan hias baik dalam negeri maupun luar negeri sudah dimulai kembali sehingga meningkatkan semangat para pembudidaya untuk meningkatkan produksi;
5. Adanya peningkatan permintaan akan kebutuhan olahan perikanan oleh masyarakat.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Dan Peternakan**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1	Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosis	kasus	0 kasus	0 kasus (269 kasus tertanggulangi)	100%

2	Unit usaha peternakan, kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	90	80	88,9%
3	Persentase Produk PAH yang ASUH	persen	46	46,19	100,4%
4	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	ton	1.955,24	2.085,09	106,64%
5	Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	25.110.221	25.359.075	100,99%
6	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton	92.036,18	93.876,90	101,99%

Sumber data : Evaluasi Internal DKPPP Kota Bekasi Tahun 2023, diolah.

### 1. Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis

Penyakit Mulut Dan Kuku dan Lumpy Skin Disease merupakan penyakit hewan menular strategis yang menyerang pada hewan ternak Ruminansia hampir seluruh wilayah di Indonesia pada sepanjang tahun 2023. Kota Bekasi memiliki total laporan Penyakit PMK tahun 2023 sebanyak 5 kasus dan penyakit LSD sebanyak 16 kasus. Akan tetapi pada akhir tahun (triwulan IV) 2023 penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease seluruhnya sudah sembuh (menjadi 0 kasus). Penyakit PMK dan LSD tidak termasuk kategori zoonosis, sehingga banyaknya kasus zoonosis pada tahun 2023 0 kasus.

Tabel 3.24

Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Kota Bekasi Tahun 2023  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi

No	Kecamatan	Penyakit	Jumlah	Penanganan
1.	Bekasi Selatan	LSD	1	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		PMK	29	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
2.	Bekasi Timur	LSD	5	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		PMK	11	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
3.	Bekasi Utara	PMK	13	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
4.	Jatiasih	LSD	2	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		PMK	48	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
5.	Jatisampurna	LSD	5	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		PMK	40	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
6.	Medansatria	PMK	6	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik

7.	Mustika Jaya	LSD	8	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		PMK	11	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
8.	Rawalumbu	PMK	10	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
9.	Pondok Gede	LSD	2	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		PMK	15	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
		Peste des Petits	33	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
10.	Pondok Melati	PMK	30	Pengobatan Vitamin, Antihistamin, Antipiretik dan Analgesik
Total kasus			269	

Sumber : Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

Telah dilakukan pengobatan suportif terhadap seluruh laporan kejadian Penyakit PMK dan LSD sehingga pada akhir tahun 2023 tercatat seluruhnya dinyatakan sembuh

**2. Unit Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan yang bersertifikat Teknis**

Tabel 3.25

Unit Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Bersertifikat Teknis di Kota Bekasi tahun 2023

No	Nama Usaha	Masalah Penyakit	Tanggal Mulai	Selesai	Uji Laboratorium (%)	Keputusan	SPK
1	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
2	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
3	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
4	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
5	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
6	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
7	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
8	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
9	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
10	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
11	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
12	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
13	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
14	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
15	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
16	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
17	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
18	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
19	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
20	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
21	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
22	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
23	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
24	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
25	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
26	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
27	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
28	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
29	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
30	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
31	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
32	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
33	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
34	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
35	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
36	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
37	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
38	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
39	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha
40	M. Satria Liris Baru	1. Diare dan demam, tidak nafsu makan, tidak ada energi	15/09/2023	14/10/2023	0%	0	Unit Usaha

No	Indikator Kinerja Utama	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Unit	Indikator
1	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
2	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
3	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
4	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
5	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
6	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
7	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
8	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
9	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
10	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
11	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
12	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
13	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
14	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
15	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
16	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
17	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
18	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
19	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
20	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
21	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
22	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
23	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
24	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
25	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
26	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
27	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
28	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
29	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
30	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
31	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
32	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
33	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
34	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
35	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
36	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
37	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
38	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
39	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
40	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
41	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
42	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
43	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
44	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
45	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
46	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
47	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
48	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
49	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%
50	Produksi Produk Ternak	Produksi Produk Ternak (PTPT) 2023/2024	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Unit usaha peternakan Kesehatan hewan dan produk hewan yang bersertifikat teknis yaitu :

- a) Selama tahun 2023 melaksanakan pembinaan hygiene sanitasi dan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
- b) Selama tahun 2023 karena ada peningkatan Jumlah pangan asal hewan yang beredar di Kota Bekasi mengalami peningkatan.
- c) Selama tahun 2023 terjadi peningkatan sarana prasarana seperti alat dan bahan uji yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan serta Keterbatasan sumber daya manusia teknis berlatar belakang dokter hewan dan paramedik yang akan bertindak sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner dan asisten pengawas kesehatan masyarakat veteriner.



Sepuluh jenis ikan hias yang banyak dibudidayakan diantaranya: arwana silver, blackghost, Botia, Cupang, Manvish, Red Discus, Sapu-Sapu Sukemoth, tetra congo, tetra, Udang Karang Mexician Dwaft yang merupakan kegiatan budidaya perikanan yang banyak digeluti masyarakat Kota Bekasi.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Ikan Hias ini yaitu :

- Selama tahun 2023 produksi sektor budidaya ikan hias meningkat karena adanya pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku usaha budidaya ikan Hias di wilayah Kota Bekasi;
- Adanya daya dukung lingkungan pembudidayaan ikan hias, dengan meningkatkan sarana prasarana penunjangdan pemilihan induk yang berkualitas;
- Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi selalu berkordinasi/hadir mendampingi para pembudidaya ikan hias untuk melaksanakan produksi dengan hasil yang baik.

**5. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi**

**Tabel 3.27  
Produksi Ikan Konsumsi di Kota Bekasi tahun 2023**

Jenis Ikan/Kelompok	Jumlah Produksi (kg)												
	Jan	Feb	Mars	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Septem	Okto	Novem	Desem	Total
<b>Salmon</b>	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	172000
<b>Lele</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000
<b>Widada</b>	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	162000

Sumber : Data dari Bidang Perikanan tahun 2023,diolah

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator program Jumlah Produksi Ikan Konsumsi ini yaitu :

- Melakukan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam meningkatkan hasil produksi ikan konsumsi;

- b. Adanya dukungan sarana prasarana dan pemilihan induk yang berkualitas.

## 6. Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Konsumsi

**Tabel 3.28**  
**Produksi Unit Pengolahan Ikan di Kota Bekasi Tahun 2023**

No	Bulan	Jumlah	Pembekuan	Pemindangan	Pengolahan Lainnya (UPI Kecil)
1	Januari	8,448,921	6,252,202	1,689,784	506,935.26
2	Pebruari	7,510,152	5,557,512	1,502,030	450,609.12
3	Maret	5,632,614	4,168,134	1,126,523	337,956.84
4	April	6,571,383	4,862,823	1,314,277	394,282.98
5	Mei	11,265,228	8,336,269	2,253,046	675,913.68
6	Juni	9,387,690	6,946,891	1,877,538	563,261.4
7	Juli	2,816,307	2,084,067	563,261	168,978.42
8	Agustus	1,877,538	1,389,378	375,508	112,652.28
9	September	13,142,766	9,725,647	2,628,553	788,565.96
10	Oktober	4,693,845	3,473,445	938,769	281,630.7
11	Nopember	12,203,997	9,030,958	2,440,799	732,239.82
12	Desember	10,326,459	7,641,580	2,065,292	619,587.54
	TOTAL	93,876,900	69,468,906	18,775,380	5,632,614.

Sumber : Bidang Perikanan

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan ini yaitu :

1. Selama tahun 2023 Meningkatkan sektor perikanan UKM olahan ikan dan meningkatkan prasarana penunjang usaha agar tetap lancar.
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan pembudidaya ikan (*lahan tambak* : udang, bandeng, dsb)
3. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Bidang Perikanan selalu berkordinasi/hadir mendampingi para pelaku UMKM Olahan hasil perikanan agar dapat meningkatkan produksi dengan hasil yang baik.

Dengan melihat capaian indikator program yang tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan. Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.29**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Dan Peternakan**  
**Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PERSENTASE PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	
		2022	2023
Target	%	41	41,5
Realisasi	%	41	44,29

*Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Laporan Tahunan DKPPP Kota Bekasi*

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 41% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 44,29%, maka DKPPP Kota Bekasi dapat terus meningkatkan capaian kinerjanya ke depan agar dapat melampaui target. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari DKPPP Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan, diantaranya :

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DKPPP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakanselama tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Dan Peternakan

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022				ANGGARAN TAHUN 2023					
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%				Rp	%		
1	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	499.250.000	385.192.755	77,15	100	22,85	863.539.500	823.427.500	95,35	100	4,65
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	324.250.000	238.575.990	73,58	100	26,42	245.446.500	239.775.500	97,69	100	2,31
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	324.250.000	238.575.990	73,58	100	26,42	245.446.500	239.775.500	97,69	100	2,31
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	110.000.000	92.746.000	84,31	100	15,69
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	-	-	110.000.000	92.746.000	84,31	100	15,69
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.000.000	146.616.765	83,78	100	16,22	508.093.000	490.906.000	96,62	100	3,38
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	175.000.000	146.616.765	83,78	100	16,22	133.093.000	120.598.000	90,61	100	9,39
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	-	-	-	-	-	370.308.000	370.308.000	98,75	100	1,25
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	425.012.000	329.841.900	77,61	100	22,39	540.177.000	432.823.400	80,13	100	19,87

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

	<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>425.012.000</b>	<b>329.841.900</b>	<b>77,61</b>	<b>100</b>	<b>22,39</b>	<b>540.177.000</b>	<b>432.823.400</b>	<b>80,13</b>	<b>100</b>	<b>19,87</b>
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	100.000.000	80.100.000	80,10	100	19,90	246.871.000	225.192.400	91,22	100	8,78
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	325.012.000	249.741.900	76,84	100	23,16	293.306.000	207.631.000	70,79	100	29,21
	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	-	-	-	-	-	<b>278.149.000</b>	<b>261.731.000</b>	<b>94,10</b>	<b>100</b>	<b>5,9</b>
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci</b>	-	-	-	-	-	<b>34.420.000</b>	<b>33.610.000</b>	<b>97,65</b>	<b>100</b>	<b>2,35</b>
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	-	-	-	-	-	34.420.000	33.610.000	97,65	100	2,35
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	-	-	-	-	-	<b>243.729.000</b>	<b>228.121.000</b>	<b>93,60</b>	<b>100</b>	<b>6,4</b>
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	243.729.000	228.121.000	93,60	100	6,4

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2023, diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program, 5 (lima) Kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan, dimana pagu anggaran pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp. 863.539.500,00 (*delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp823.427.500,00 (*delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang mana dari serapan anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 95,35% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.

Kemudian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp540.177.000,00 (*lima ratus empat puluh juta serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp432.823.400,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 80,13% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.

Selain itu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp278.149.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta serratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp261.731.000,00 (*dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar usaha pengolahan, pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha olahan perikanan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 94,10% dalam mendukung capaian Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.

Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan sebesar 44,29% dari target sebesar 41,5% atau dengan capaian kinerja sebesar 106,72%, serta serapan anggaran sebesar 95,35%,

80,13% dan 94,10 maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 4,65%, 19,87% dan 5,9% dan terdapat sisa anggaran yang cukup besar, namun begitu capaian kinerja sudah mencapai target dan mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.31**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Dan Peternakan Tahun 2023 dengan tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	persen	41	44,29

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan terdapat kenaikan capaian kinerja dari 41% pada tahun 2022 menjadi 44,29% pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 3,29%.

DKPPP Kota Bekasi harus meningkatkan capaian kinerja persentase peningkatan hasil produksi perikanan dan peternakan oleh karena itu untuk kedepan DKPPP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pencapaian persentase peningkatan hasil produksi perikanan dan peternakan secara optimal.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi kepada peternak, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi peternakan;
2. Melakukan monitoring dan pelayanan kesehatan hewan;
3. Melakukan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil melalui : pelatihan inovasi dan teknologi budidaya ikan konsumsi, pelatihan pembuatan pakan ikan(mandiri), bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele;
4. Pelatihan bagi pembudidaya ikan konsumsi dan ikan hias.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) sebesar Rp. 6.395.062.947,-. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja didukung dengan anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) sebesar Rp. 17.093.150.302,-.

Realisasi anggaran BLU berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.375.148.000,- dan realisasi BLPU sebesar Rp. 13.826.992.264,- berikut rincian dalam tabel :

Tabel 3.32  
Realisasi Belanja Langsung Urusan Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023

Tabel 3.32  
Realisasi Belanja Langsung Urusan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	SUMBER DANA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	159.720.000	521.240.000	445.963.000	85,56	PAD
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	-	133.670.000	133.670.000	100	PAD
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	-	133.670.000	133.670.000	100	PAD
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	159.720.000	387.570.000	312.293.000	80,58	PAD/ BANDEK
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	159.720.000	387.570.000	312.293.000	80,58	PAD/ BANDEK
2	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	1.373.670.000	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	PAD
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1.240.000.000	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	PAD
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.240.000.000	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	PAD
3	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	379.045.000	379.045.000	349.972.000	92,33	PAD
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	379.045.000	379.045.000	349.972.000	92,33	PAD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	379.045.000	379.045.000	349.972.000	92,33	PAD
4	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	438.369.600	2.572.912.447	1.008.525.500	39,2	PAD
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	95.819.100	1.091.319.100	174.575.000	16	PAD
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	95.819.100	961.319.000	94.575.000	9,84	PAD
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	95.780.500	1.234.823.347	744.809.500	60,32	PAD
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	95.780.500	827.373.500	744.809.500	90,02	PAD
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	407.449.847	0	0	PAD
	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	147.600.000	147.320.000	57.132.000	38,78	PAD
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	147.600.000	147.320.000	57.132.000	38,78	PAD
<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	99.450.000	99.450.000	32.009.000	32,19	PAD	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	99.450.000	99.450.000	32.009.000	32,19	PAD
5	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>378.539.500</b>	<b>863.539.500</b>	<b>823.427.500</b>	<b>95,35</b>	<b>PAD</b>
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>245.446.500</b>	<b>245.446.500</b>	<b>239.775.500</b>	<b>97,69</b>	<b>PAD</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	245.446.500	245.446.500	239.775.500	97,69	PAD
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	110.000.000	92.746.000	84,31	PAD
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	110.000.000	92.746.000	84,31	PAD
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>133.093.000</b>	<b>508.093.000</b>	<b>490.906.000</b>	<b>96,62</b>	<b>PAD</b>
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	133.093.000	133.093.000	120.598.000	90,61	PAD
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	-	370.308.000	370.308.000	98,75	PAD
6	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>540.177.000</b>	<b>540.177.000</b>	<b>432.823.400</b>	<b>80,13</b>	<b>PAD</b>
	<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>540.177.000</b>	<b>540.177.000</b>	<b>432.823.400</b>	<b>80,13</b>	<b>PAD</b>
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	246.871.000	246.871.000	225.192.400	91,22	PAD
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	293.306.000	293.306.000	207.631.000	70,79	PAD
7	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>278.149.000</b>	<b>278.149.000</b>	<b>261.731.000</b>	<b>94,10</b>	<b>PAD</b>
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci</b>	<b>34.420.000</b>	<b>34.420.000</b>	<b>33.610.000</b>	<b>97,65</b>	<b>PAD</b>
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	34.420.000	34.420.000	33.610.000	97,65	PAD
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>243.729.000</b>	<b>243.729.000</b>	<b>228.121.000</b>	<b>93,60</b>	<b>PAD</b>
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.729.000	243.729.000	228.121.000	93,60	PAD

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2023,diolah

### 3.3.1 ANALISIS REALISASI ANGGARAN DKPPP TAHUN 2023

Untuk mengetahui persentase tingkat *effectiveness* harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila dari hasil pembagian tersebut di atas 100%, itu artinya sangat efektif.
2. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya 80% sampai 90%, maka dapatdiartikan cukup efektif.
4. Apabila pembagian tersebut hasilnya di angka 60% sampai 80%, dapatdiartikan kurang efektif.
5. Apabila pembagian tersebut hasilnya di bawah 60%, diartikan tidakefektif.

Pengukuran rasio efektivitas anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagaiberikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{18.202.140.264}{23.488.213.249} \times 100\% \\ &= \mathbf{77,49\%} \end{aligned}$$

Adapun rasio efektivitas anggaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Belanja 2023	Realisasi Belanja 2023	%	Kriteria Efektivitas
<b>BELANJA</b>	<b>23.488.213.249</b>	<b>18.202.140.264</b>	<b>77,49</b>	<b>Kurang Efektif</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>22.755.054.749</b>	<b>17.750.805.264</b>	<b>78,01</b>	<b>Kurang Efektif</b>
Belanja Pegawai	13.637.204.000	10.598.094.941	77,71	<b>Kurang Efektif</b>
Belanja Barang dan	9.117.850.749	7.152.710.323	78,45	<b>Kurang</b>

Jasa				<b>Efektif</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>733.158.500</b>	<b>451.335.000</b>	<b>61,56</b>	<b>Kurang Efektif</b>
Belanja Modal Peralatandan Mesin	733.158.500	733.158.500	61,56	<b>Kurang Efektif</b>

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran DKPPP tahun 2023 sebesar 77,49%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “Kurang efektif”. Adapun sisa anggaran DKPPP tahun 2023 adalah sebesar Rp5.286.072.985

Guna menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan realisasi dengan anggaran belanja dinas. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan persentase antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan persentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Adapun rumus perhitungan efisiensi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan persentase di atas 100%, maka artinya tidak efisien.
2. Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% sampai 100%, dapat diartikan kurang efisien.
3. Apabila hasil dari perhitungan tersebut di angka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien.
4. Apabila hasil perhitungan tersebut di angka 60% sampai 80%, artinya efisien.
5. Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka di bawah 60%, dapat diartikan sangat efisien.

Pengukuran rasio efektivitas anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{18.202.140.264}{23.488.213.249} \times 100\% = 77,49\%$$

Adapun rasio efisiensi anggaran DKPPP yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Belanja 2023	Realisasi Belanja 2023	%	Kriteria Efisiensi
<b>BELANJA</b>	<b>23.488.213.249</b>	<b>18.202.140.264</b>	<b>77,49</b>	<b>Efisien</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>22.755.054.749</b>	<b>17.750.805.264</b>	<b>78,01</b>	<b>Efisien</b>
Belanja Pegawai	13.637.204.000	10.598.094.941	77,71	efisien
Belanja Barang dan Jasa	9.117.850.749	7.152.710.323	78,45	Efisien
<b>Belanja Modal</b>	<b>733.158.500</b>	<b>451.335.000</b>	<b>61,56</b>	<b>Efisien</b>
Belanja Modal Peralatandan Mesin	733.158.500	733.158.500	61,56	efisien

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efisiensi, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran DKPPP tahun 2023 sebesar 77,49%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “efisien”. Adapun sisa anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar Rp5.286.072.985.

#### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis. Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki 4 (empat) sasaran strategis serta 4 (empat) indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pencapaian Kinerja ini akan kami tingkatkan oleh seluruh aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Sehingga visi Kota Bekasi “Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”, dapat terwujud.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

#### 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2023 adalah tahun kelima

periode Renstra 2018-2023. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam urusan Pangan, urusan Pertanian serta urusan Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing;
3. Memperbaiki dan menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan;
4. Menjalin kerja sama dengan instansi lain (stakeholder) dalam pelaksanaan program-program DKPPP dan melakukan upaya-upaya progresif dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Bekasi, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19741017 199603 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH PADA  
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA):

Nama : HERBERT S. W. PANJAITAN, S.STP, M.Si  
NIP : 19741017 199803 1 002  
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. II IV.b  
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO  
Jabatan : Plt. Wali Kota Bekasi

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka membenarkan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Plt. Wali Kota Bekasi

Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

HERBERT S.W. PANJAITAN, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. II IV.b  
NIP. 19741017 199803 1 002

Lampiran 1 : Indikator Kinerja

Peningkat Daerah : Dinas Kota-kota Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Tahun Anggaran : 2013

NO	Desain Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tribulan	Target Per Tribulan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD khususnya Dinas Kota-kota Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	Nilai Akuntabilitas Dinas Kota-kota Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	%	85	Tribulan I Tribulan II Tribulan III Tribulan IV	-- -- -- 85
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Kaut	Persentase Peningkatan Perolehan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	41,2%	Tribulan I Tribulan II Tribulan III Tribulan IV	-- -- -- 41,2%
3	Meningkatkan Proses Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	%	42%	Tribulan I Tribulan II Tribulan III Tribulan IV	-- -- -- 42%
4	Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Perikanan	%	41,2%	Tribulan I Tribulan II Tribulan III Tribulan IV	-- -- -- 41,2%

Jumlah Anggaran :

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1 | PROGRAM PENLUNGAN LURAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Rp16.044.000.000 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN OPRERASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT            | Rp150.720.000    |
| 3 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                     | Rp1.373.870.000  |
| 4 | PROGRAM PENGAWASAN KERAWANAN PANGAN                                     | Rp370.340.000    |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  | Rp40.177.000     |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PERIKANAN                     | Rp370.140.000    |
| 7 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOMBANGAN SARANA PERTANIAN                  | Rp100.000.000    |
| 8 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rp770.000.000    |

Rata-rata :

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Anggaran APBD               | Rp16.044.000.000 |
| Anggaran Dekonsentrasi / TT | Rp1.340.000.000  |

IRWAN KEDUA,  
PE. MALI KOTA SOLABI

Dr. THA AHMAD TAJAYONO

Bekasi, 02 Januari 2013

ROBERT S.W. PANANTAN, S.STP, M.Si  
KORAN, DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

ROBERT S.W. PANANTAN, S.STP, M.Si  
Pondok Tj. 8 No 2  
HP : 074911718003 / 000

Lampiran 1 : Alokasi Kapfabin Per Triwulan

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	TRIMULAH				Kor
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA</b>	<b>12.641.092.500</b>	<b>3.261.012.212</b>	<b>6.353.369.143</b>	<b>1.788.243.629</b>	<b>1.238.407.516</b>	
-	Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	-	3.000.000	-	-	
1	Koordinasi dan Pertemuan Laporan Kegiatan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja S-KE	7.000.000	-	7.000.000	-	-	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.641.092.500	3.261.012.212	6.353.369.143	1.788.243.629	1.238.407.516	
1	Persediaan Kas dan Tanggapan ASH	1.120.204.000	3.261.012.212	6.353.369.143	1.788.243.629	1.238.407.516	
2	Koordinasi dan Pertemuan Laporan Kegiatan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja S-KE	3.000.000	-	3.000.000	-	-	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
4	Penelitian dan Pengujian Perangkat Perangkat Tugass dan Fungsi	20.000.000	0.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.814.500	31.561.000	349.049.000	31.621.000	31.731.000	
1	Persediaan Komponen Intelektual dan Tanggapan Jaringan Kantor	25.000.000	-	25.000.000	-	-	
2	Persediaan Bahan Logistik Kantor	284.520.000	-	284.520.000	-	-	
3	Persediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	126.210.000	7.050.000	7.150.000	7.150.000	7.050.000	
4	Persediaan Bahan Kantor dan Pengujian Perangkat Tugass dan Fungsi	20.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
5	Persediaan Bahan Realisasi dan Administrasi SMPN	79.064.500	19.021.000	19.021.000	19.021.000	19.021.000	
5	Persediaan Bahan dan Lainnya pada S-KE	5.000.000	-	5.000.000	-	-	
-	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.130.730.500	305.962.800	631.674.370	631.674.370	631.674.370	
1	Persediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, dan Lain-lain	240.110.000	49.529.000	49.529.000	49.529.000	49.529.000	
2	Persediaan Jasa Pengangkutan Umum Kota	1.650.780.250	89.510.516	49.510.516	49.510.516	49.510.516	
-	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.880.000	132.398.310	132.398.310	132.398.310	132.398.310	
1	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pegawai dan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	66.200.000	0.000.000	0.000.000	-	-	
2	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pajak Kendaraan Dinas dan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dan Lainnya	119.500.000	74.500.000	45.000.000	-	-	
3	Persediaan Pemeliharaan dan Lainnya	40.000.000	-	0.000.000	-	-	
4	Persediaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	150.000.000	-	
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>169.730.000</b>	<b>12.520.000</b>	<b>147.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
-	Pembinaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita (gk) tahun sesuai dengan target Kabupaten Gbi	159.730.000	12.520.000	147.200.000	-	-	
-	Pembinaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita (gk) tahun sesuai dengan target Kabupaten Gbi	109.730.000	12.520.000	147.200.000	-	-	
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>1.373.671.000</b>	<b>132.570.000</b>	<b>296.410.000</b>	<b>666.690.000</b>	<b>-</b>	

No	Nama Program / Kegiatan	Penganggaran	TRIMULAN				Jml
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Peta Kemakmuran dan Kesehatan Rumpun Masyarakat Tanjung. (1) Peta makmuran dan kesehatan Peta. Kabupaten dan Kota (1000)	138.870.000	122.870.000	-	11.000.000	-	-
	Purwok	138.870.000	122.870.000	-	11.000.000	-	-
2	Pengembangan Kemandirian Rumpun Masyarakat Kabupaten Kota Peta kemakmuran, kesehatan, dan budaya dan penyediaan lapangan pangan sawah kemandirian pangan yang terdapat dalam 4 (empat) Daerah Kabupaten/	1.240.810.000	-	385.410.000	855.400.000	-	-
	Kota	1.240.810.000	-	385.410.000	855.400.000	-	-
IV	PROGRAM PENGUMUMAN KEWASIHAN PANGAN Pelibatan Pengembangan Kemandirian Pangan Bogor Daerah Kabupaten/	379.845.000	399.249.000	8.045.000	4.749.000	-	-
	Kota	379.845.000	399.249.000	8.045.000	4.749.000	-	-
V	PROGRAM PENSIKILAH PERIKAWAH BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	640.177.000	60.111.000	488.066.000	-	-	-
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	640.177.000	60.111.000	488.066.000	-	-	-
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Pembinaan Pembudidayaan Samudra dan Perikanan Terasa dan Inovasi pada Pengaplikasian Perikanan dan Perikanan	248.871.000	00.111.000	248.760.000	-	-	-
	Pembinaan Pembudidayaan Samudra dan Perikanan Terasa dan Inovasi pada Pengaplikasian Perikanan dan Perikanan	248.871.000	00.111.000	248.760.000	-	-	-
VI	PROGRAM PERHILIHAN DAN PERAGARAN HAKIL PERIKAWAH Pembinaan Hiliris dan Kemandirian Hasil Perikanan bagi usaha Perikanan dan Perikanan (Sektor Hiliris dan Kecil)	34.420.000	-	34.420.000	-	-	-
	Pembinaan Hiliris dan Kemandirian Hasil Perikanan bagi usaha Perikanan dan Perikanan (Sektor Hiliris dan Kecil)	34.420.000	-	34.420.000	-	-	-
1	Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.729.000	-	-	243.729.000	-	-
	Sumberdaya Lokal pada Usaha Perikanan Sawah (1000 Lit. / 1000 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.729.000	-	-	243.729.000	-	-
VII	PROGRAM PENYERAPAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERTANIAN Pengembangan Penggunaan Bahan Pertanian	93.810.100	-	93.810.100	-	-	-
	Pengembangan Penggunaan Bahan Pertanian	93.810.100	-	93.810.100	-	-	-
1	Pengelolaan Sempurna (SOP) Hewan, Tumbuhan dan Mikro- Organisme Kemandirian Kota/Kota	35.780.500	-	35.780.500	-	-	-
	Pengelolaan Sempurna (SOP) Hewan, Tumbuhan dan Mikro- Organisme Kemandirian Kota/Kota	35.780.500	-	35.780.500	-	-	-
1	Pengelolaan MUD dan Pertanian Berhingga Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.320.000	17.500.000	132.720.000	13.500.000	18.500.000	-
	Pengelolaan MUD dan Pertanian Berhingga Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.320.000	17.500.000	132.720.000	13.500.000	18.500.000	-

No	Nama Program / Kegiatan	Page Anggaran	TRIMULAN				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengawasan Mutu Sengat/Gigit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	147.320.000	17.500.000	102.720.000	13.500.000	13.500.000	
-	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengedar	88.450.000	7.375.000	88.575.000	3.500.000		
1	Pemeriksaan Mutu, Kualitas dan Keamanan Pangan/Obat Hewan	88.450.000	7.375.000	88.575.000	3.500.000		
YTB	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT YETERMER</b>	<b>378.838.800</b>	<b>57.375.000</b>	<b>148.375.000</b>	<b>144.094.500</b>	<b>31.800.000</b>	
-	Perjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	245.448.500	40.670.000	102.750.000	83.726.500	18.300.000	
1	Pengestakan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	245.448.500	40.670.000	102.750.000	83.726.500	18.300.000	
-	Penerapan dan Pengawasan Penerapan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner	133.883.000	16.700.000	42.525.000	66.368.000	13.500.000	
1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	133.883.000	16.700.000	42.525.000	66.368.000	13.500.000	

PIHAK KEDUA,  
PEL WALI KOTA BEKASI

DR. TRI ADI MANTO TJAHYONO

Bekasi, 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN KOTA BEKASI

HERBERT S.W. PANJAITAN, S.STP, M.Si  
Panglima Tk. 3 IV b  
NIP. 19740217 199003 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH PADA  
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai **Pengguna Anggaran (PA)**:

Nama : HERBERT S. W. PANJAITAN, S.STP, M.Si  
NIP : 19741017 199603 1 002  
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/ IV.c  
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. GANI MUHAMAD  
Jabatan : Pj. WALI KOTA BEKASI

Sesaku asan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, November 2023

**PIHAK KEDUA,**

Pj. WALI KOTA BEKASI,

**R. GANI MUHAMAD**

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI**

**HERBERT S.W. PANJAITAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19741017 199603 1 002

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Trikwulan	Target Per Triwulan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	Nilai Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	%	83	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	83
2	Meningkatnya Keamanan Pangan yang Nutrisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	41,5%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	41,5%
3	Meningkatnya Produksi hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	%	42%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	42%
4	Meningkatnya Produksi hasil Perikanan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Perikanan	%	41,5%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	41,5%

## Jumlah Anggaran :

- 1 PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp17.000.150.000
- 2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHAPAN PANGAN MASYARAKAT Rp21.540.000
- 3 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Rp1.240.000.000
- 4 PROGRAM PENGLAWANAN KEAMANAN PANGAN Rp379.049.000
- 5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp540.177.000
- 6 PROGRAM PENOLAKAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp279.140.000
- 7 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Rp2.573.912.447
- 8 PROGRAM PENGUNJIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Rp900.000.000

## Keterangan :

- Anggaran APBD Rp20.181.713.500
- Anggaran Dana Hibah / TP
- Anggaran Perubahan APBD Rp 3.268.407.000

PIHAK KEDUA,  
PJ. WALI KOTA BEKASI



R. GANI MUHAMAD

Bekasi, November 2023

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI



HERBERT S.W. PANJAITAN, S.STP., M.Si  
Pemula Utama Nomor Telp :  
NP. 130741017 19603 1 002

Lampiran II : Alokasi Anggaran Per Triwulan

No	Nama Program/Menyakit	Pagu Anggaran	TRIMULAN				Keb
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</b>	17,000,100,000	3,000,010,000	5,330,000,000	3,660,010,000	4,990,020,000	
-	Peningkatan Fungsi, Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
1	Kecerdasan dan Penguatan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan (SKPK)	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
-	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	73,000,000,000	2,000,000,000	4,400,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	
1	Prosedur dan Tata Kelola Keuangan ASN	10,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
2	Kendali dan Penguatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
-	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
-	Administrasi dan Pelaporan Pegawai Pemerintah Tidak Tetap dan Pegawai Administrasi Umum Pemerintah Daerah	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
-	Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN/Manajemen Organisasi Kerja	400,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
-	Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN/Manajemen Organisasi Kerja	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
2	Pengembangan Sistem Logistik	25,000,000	-	25,000,000	-	-	
3	Perbaikan Sistem Pelaporan dan Pengendalian	20,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
4	Pengembangan Sistem dan Pelaporan Penganggaran	20,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
5	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Kontrol SKPD	10,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
6	Peningkatan Akutifitas Kinerja SKPD	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
-	Pengembangan Jasa Pemasangan Ujung Pemerintahan Daerah	2,000,000,000	400,000,000	600,000,000	600,000,000	700,000,000	
1	Pengembangan Jasa Kerja Jasa Sumber Daya Manusia	200,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000	
2	Pengembangan Jasa Pekerjaan Umum Kerja	1,000,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000	400,000,000	
-	Pembelajaran Berbasis IKT Daerah Pengantar Ujung Pemerintahan Daerah	500,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	200,000,000	
-	Pengembangan Jasa Pemasangan, Servis Pemeliharaan dan Pasokan Perbaikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras	200,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000	
3	Pengembangan Jasa Pemeliharaan Elemen Pemerintahan, Papan dan Papan Kerja	500,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	200,000,000	
1	Pengembangan Jasa Pemeliharaan Papan dan Papan Kerja	200,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000	
2	Pengembangan Jasa Pemeliharaan Papan dan Papan Kerja	300,000,000	60,000,000	90,000,000	90,000,000	130,000,000	
4	Pembelajaran Berbasis Ujung Pemerintahan Daerah dan Papan Kerja	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
0	<b>PROGRAM Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat</b>	600,000,000	-	600,000,000	100,000,000	100,000,000	
-	Pengembangan dan Penguatan Fungsi Paksi atau Papan Lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Fungsi dan Hubungan	100,000,000	-	-	-	100,000,000	
-	Pengembangan Program Kerja Pegawai Burekrasi Maksimal	100,000,000	-	-	-	100,000,000	
-	Pembelajaran Berbasis Ujung Pemerintahan Daerah dan Papan Kerja	200,000,000	-	200,000,000	100,000,000	-	
-	Pengembangan Program Kerja Pegawai Burekrasi Maksimal	200,000,000	-	200,000,000	100,000,000	-	

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	TRIMULAH			K/L
			I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembinaan Masyarakat dalam Tanggapan Bencana Kota dan Peningkatan Berbasis Keluarga Desa Lokal	307.770.000	-	245.870.000	146.200.000	-
II	<b>PROGRAM PEMBERKASAN KEMAHAN KAWALAN</b>	4.240.000.000	-	385.490.000	884.590.000	-
1	Perencanaan Peta Kemiskinan dan Kewaspadaan Pangan Masyarakat Masyarakat Kota dan Desa di Kota Kalimantan dan Wilayahnya	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Kemampuan Pangan Kota dengan Kabupaten Kota	4.240.000.000	-	385.490.000	884.590.000	-
2	Perencanaan Pangan, pasar, pasar lokal dan penyediaan pangan pangan Kota dan Wilayahnya yang mencakup dalam 4 (empat) Daerah Kabupaten Kota	1.240.000.000	-	985.490.000	884.590.000	-
III	<b>PROGRAM PENGALIHAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	379.048.000	399.248.000	1.049.000	4.750.000	-
1	Pelayanan Kesehatan Kesehatan Masyarakat dengan Fokus Kesehatan Kota	379.048.000	399.248.000	1.049.000	4.750.000	-
1	Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan Fokus Kesehatan Kota	379.048.000	399.248.000	1.049.000	4.750.000	-
IV	<b>PROGRAM PENGALIHAN PERILAKU BUDIDAYA</b>	646.777.000	60.111.000	498.090.000	-	-
1	Pembinaan Pembudidayaan Ikan (Perikanan)	340.577.000	60.111.000	498.090.000	-	-
1	Pengembangan Apresiasi Masyarakat Kota dan Desa	245.870.000	-	245.870.000	-	-
2	Pembinaan Pembudidayaan Ikan (Perikanan) dan Peningkatan Teknologi dan Informasi pada Bidang Kegiatan Perikanan dan Perikanan	399.200.000	60.111.000	211.180.000	-	-
VI	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	278.149.000	-	34.420.000	243.729.000	-
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kecil	34.420.000	-	34.420.000	-	-
1	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Perikanan dan Kecil	243.729.000	-	34.420.000	-	-
1	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 4 (empat) Daerah Kabupaten/Kota	243.729.000	-	-	243.729.000	-
1	Pembinaan Usaha dan Pemasaran Perikanan dan Kecil	243.729.000	-	-	243.729.000	-
VII	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTAHANAN</b>	2.071.213.447	20.378.000	1.068.720.000	103.740.000	1.416.410.947
1	Pengadaan Pengamanan Sarana Pertahanan	1.091.819.100	-	94.819.100	-	888.990.000
1	Pembinaan Pengamanan Sarana Pertahanan Pemerintah Daerah dengan Komando, Tenaga dan Organisasi	130.000.000	-	-	-	120.000.000
2	Pengembangan Sarana Pertahanan	68.319.100	-	68.319.100	-	68.319.100
1	Pengadaan Sarana Pertahanan (SPP) Mekanis, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kota dan Wilayahnya	1.234.021.247	-	797.688.800	99.740.000	467.440.947
1	Pengadaan Sarana Pertahanan (SPP) Mekanis, Tumbuhan dan Mikro Organisme	127.373.500	-	797.688.800	99.740.000	-

No	Nama Program / Kegiatan	Page Anggaran	TRIMULAN				Cat
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Perantaraan SDO Hewan/Tanaman	407.449.947				407.449.947	
-	Peningkatan Mutu dan Pasca panen Berhambit Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.320.000	17.699.000	102.720.000	13.500.000	13.500.000	
1	Pengawasan Mutu Berhambit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Ekstir Feed	147.320.000	17.699.000	102.720.000	13.500.000	13.500.000	
-	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengacur	99.650.000	7.375.000	98.575.000	3.500.000	-	
1	Pengawasan Mutu, Kualitas dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	102.400.000	7.375.000	98.575.000	3.500.000	-	
VIII	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>993.539.500</b>	<b>57.379.000</b>	<b>146.276.999</b>	<b>144.004.999</b>	<b>919.880.000</b>	
-	Pengamanan Kesehatan Hewan, Perutupan dan Pembukaan Daerah Yabab Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	245.446.500	40.670.000	102.750.000	63.726.500	18.300.000	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	245.446.500	40.670.000	102.750.000	63.726.500	18.300.000	
-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000				110.000.000	
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	110.000.000				110.000.000	
-	Perutupan dan Pengawasan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	508.593.000	16.709.000	42.525.000	60.368.000	388.900.000	
1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	133.060.000	10.700.000	42.525.000	60.368.000	13.500.000	
2	Perenpot Perenouat Perjanjian Teknis	375.000.000				375.000.000	

PIHAK KEDUA,  
Pj. WALI KOTA BEKASI

R. GANI MUHAMMAD

Bekasi, November 2023

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

HERBERT S.W. PANJAITAN S.STP. M.Si  
Pembina Utama Muda/ Ir. C  
NIP. 19741017 199603 1 032